PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Warsawa, pada tanggal 4 September 2013 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

www.bphn.go.id

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*)

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia mengenai Pembebasan Visa

bagi. . .

www.bphn.go.id

bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 September 2013 di Warsawa, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Polandia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Polandia, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.bphn.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

Bistok Simbolon

www.bphn.go.id

REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia, selanjutnya disebut **"Para Pihak"**;

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan bersahabat antara kedua negara;

BERKEINGINAN untuk memfasilitasi masuk dan perjalanan antar kedua negara bagi warga negaranya pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
PEMBEBASAN VISA

1. Warga Negara Indonesia pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dan diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Polandia untuk jangka waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dalam suatu periode jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dihitung dari tanggal pertama kali masuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

www.bphn.go.id

2. Warga Negara Polandia pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dan diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Polandia tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal masuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

Pasal 2
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Ketentuan dalam Pasal 1 tidak berlaku bagi warga negara dari salah satu Pihak yang memegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler di wilayah pihak lain atau untuk anggota keluarga yang merupakan bagian dari keluarga mereka. Sebelum memasuki wilayah Pihak lain, warga negara tersebut wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari misi diplomatik Pihak lainnya.

Pasal 3
MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

Pasal 4
HAK PIHAK BERWENANG

1. Warga negara dari salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah wajib mematuhi hukum yang berlaku di wilayah Pihak lain ketika melintasi perbatasan dan selama tinggal di wilayah Pihak lain.

2. Setiap Pihak berhak untuk menolak masuk atau mempersingkat masa tinggal dari setiap warga negara Pihak lainnya apabila dianggap bahwa warga negara tersebut tidak dikehendaki atau dicurigai dapat membahayakan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau keamanan nasional.

www.bphn.go.id

Pasal 5
CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1. Para Pihak wajib saling bertukar contoh-contoh paspor diplomatik dan paspor dinasnya yang sah, melalui saluran diplomatik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini.

2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan paspor dinas baru, serta modifikasi terhadap paspor yang masih berlaku, Para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.

3. Dalam hal warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik atau dinasnya di wilayah Pihak lain, mereka wajib segera memberitahukan kepada pejabat berwenang di negara Pihak penerima melalui misi diplomatik atau pos konsuler yang mewakili negara asal. Misi diplomatik atau pos konsuler yang bersangkutan, sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya, wajib menerbitkan kepada orang dimaksud, suatu dokumen untuk kembali ke negara asalnya.

Pasal 6
PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak berhak menunda sementara Persetujuan ini secara keseluruhan maupun sebagian untuk alasan-alasan keamanan nasional, keamanan masyarakat, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat.

2. Penangguhan serta pembatalan penangguhan menurut ayat 1 Pasal ini harus segera diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

Pasal 7
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.

www.bphn.go.id

Pasal 8
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Perubahan atau revisi tersebut, termasuk khususnya perpanjangan periode sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Persetujuan ini. Perubahan atau revisi tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.

Pasal 9
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya, pemberitahuan terakhir melalui saluran diplomatik, dimana Para Pihak telah saling memberitahukan bahwa semua persyaratan prosedur hukum internal yang dipersyaratkan untuk berlakunya Persetujuan ini, telah dipenuhi.

2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan melalui saluran diplomatik. Dalam hal demikian, Persetujuan ini akan berakhir 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan pengakhiran.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberikan kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Warsawa, pada tanggal 4 September 2013, dalam rangkap dua asli, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Polandia, dan Bahasa Inggris, semua naskah tersebut memiliki keaslian yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA
DIAN TRIANSYAH DJANI	**BOGUSŁAW WINID**
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia	*Undersecretary of State* pada Kementerian Luar Negeri Republik Polandia

www.bphn.go.id

REPUBLIK INDONESIA

UMOWA
MIĘDZY RZĄDEM REPUBLIKI INDONEZJI
A
RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
O ZNIESIENIU OBOWIĄZKU WIZOWEGO
DLA POSIADACZY PASZPORTÓW DYPLOMATYCZNYCH I SŁUŻBOWYCH

Rząd Republiki Indonezji i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami",

- **PRAGNĄC** zacieśnić przyjazne stosunki pomiędzy obydwoma krajami;
- **PRAGNĄC** ułatwić wjazd oraz podróżowanie między obydwoma krajami ich obywatelom legitymującym się ważnymi paszportami dyplomatycznymi i służbowymi;
- **ZGODNIE** z obowiązującymi przepisami prawa obydwu krajów;

UZGODNIŁY, co następuje:

Artykuł 1
ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WIZOWEGO

1. Obywatele indonezyjscy legitymujący się ważnymi paszportami dyplomatycznymi lub służbowymi wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji, są uprawnieni do wjazdu, tranzytu oraz pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wiz przez okres nie dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni w okresie 180 (stu osiemdziesięciu) dni, liczonych od daty pierwszego wjazdu, z zastrzeżeniem Artykułu 2.

2. Obywatele polscy legitymujący się ważnymi paszportami dyplomatycznymi lub służbowymi wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, są uprawnieni do wjazdu, tranzytu oraz pobytu na terytorium Republiki Indonezji bez wiz, przez okres nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, liczonych od daty wjazdu, z zastrzeżeniem Artykułu 2.

www.bphn.go.id

Artykuł 2

WIZY DLA CZŁONKÓW MISJI DYPLOMATYCZNYCH ORAZ URZĘDÓW KONSULARNYCH

Przepis art. 1 nie dotyczy obywateli Umawiających się Stron legitymujących się ważnymi paszportami dyplomatycznymi lub służbowymi, wyznaczonych do pracy jako członkowie misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, a także członków ich rodzin pozostających z nimi we wspólnocie domowej. Osoby te mają obowiązek, przed wjazdem na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, uzyskania stosownej wizy wjazdowej w misji dyplomatycznej drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 3

OKRES WAŻNOŚCI PASZPORTU

Okres ważności paszportów, którymi legitymują się obywatele każdej z Umawiających się Stron, będzie wynosił nie mniej niż 6 (sześć) miesięcy, licząc od dnia wjazdu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 4

UPRAWNIENIA WŁADZ

1. Obywatele jednej Umawiającej się Strony legitymujący się ważnymi paszportami dyplomatycznymi lub służbowymi są zobowiązani przestrzegać przepisów prawa obowiązujących na terytorium drugiej Umawiającej się Strony przy przekraczaniu granicy oraz przez cały okres pobytu na jej terytorium.

2. Każda z Umawiających się Stron zastrzega sobie prawo do odmowy wjazdu lub do skrócenia pobytu na swoim terytorium osób uznanych za niepożądane lub mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego, zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa narodowego.

Artykuł 5

WZORY PASZPORTÓW I DOKUMENTÓW PODRÓŻY ORAZ ICH WYDAWANIE

1. Umawiające się Strony przekażą sobie nawzajem, drogą dyplomatyczną, aktualne wzory paszportów dyplomatycznych i służbowych, w terminie 30 (trzydziestu) dni po podpisaniu niniejszej Umowy.

www.bphn.go.id

2. Umawiające się Strony przekażą sobie nawzajem pisemnie, drogą dyplomatyczną, informacje na temat nowych lub zmienionych wzorów paszportów dyplomatycznych i służbowych, na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed datą rozpoczęcia ich obowiązywania.

3. Jeżeli obywatel jednej z Umawiających się Stron utraci na terytorium drugiej Umawiającej się Strony swój paszport dyplomatyczny lub służbowy, albo paszport taki ulegnie zniszczeniu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, obowiązany jest on niezwłocznie powiadomić właściwe władze państwa przyjmującego za pośrednictwem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego kraju swego pochodzenia. Właściwa misja dyplomatyczna lub urząd konsularny wyda tej osobie dokument uprawniający do powrotu do kraju jego pochodzenia, zgodnie z przepisami prawa państwa wysyłającego.

Artykuł 6
ZAWIESZENIE

1. Każda z Umawiających się Stron może czasowo zawiesić stosowanie niniejszej Umowy, w całości lub w części, ze względu na bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny lub ochronę zdrowia publicznego.

2. Zawieszenie Umowy, jak również uchylenie zawieszenia, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego Artykułu, będzie niezwłocznie notyfikowane drogą dyplomatyczną drugiej Umawiającej się Stronie.

Artykuł 7
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie rozbieżności lub spory wynikające z interpretacji lub wykonywania postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze konsultacji lub negocjacji między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 8
ZMIANY

Jeżeli Umawiające się Strony uznają to za konieczne, do niniejszej Umowy można wprowadzić zmiany w drodze pisemnego porozumienia Stron. Zmiany te, które w szczególności polegać mogą na przedłużeniu terminów określonych w Artykule 1, wejdą w życie w dacie ustalonej przez Umawiające się Strony.

www.bphn.go.id

Artykuł 9

WEJŚCIE W ŻYCIE, CZAS OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania drogą dyplomatyczną późniejszej notyfikacji, którymi Umawiające się Strony poinformują się nawzajem o spełnieniu wszystkich, przewidzianych prawem wewnętrznym Stron, wymogów wejścia w życie Umowy.

2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może ją wypowiedzieć w drodze notyfikacji, przekazanej drogą dyplomatyczną. W takim przypadku Umowa utraci moc obowiązującą po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od otrzymania notyfikacji o jej wypowiedzeniu.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, będący do tego należycie upoważnieni przez swoje Rządy, zawarli niniejszą Umowę.

SPORZĄDZONO w Warszawie, w dniu 4 września 2013 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach: indonezyjskim, polskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie różnic w ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU
REPUBLIKI INDONEZJI

DIAN TRIANSYAH DJANI
Dyrektor Generalny
do spraw Ameryki I Europy
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Republiki Indonezji

Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BOGUSŁAW WINID
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej

www.bphn.go.id

REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland hereinafter referred to as the "**Contracting Parties**";

DESIRING to strengthen the existing friendly relations between the two countries;

WISHING to facilitate entry and travel between the two countries for their citizens holding valid diplomatic and service passports;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows:

Article 1
EXEMPTION FROM VISAS

1. Indonesian citizens holding valid diplomatic or service passports issued by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Republic of Poland for a period of up to 90 (ninety) days during a period of 180 (one hundred and eighty) days from the date of their first entry, subject to Article 2.

www.bphn.go.id

2. Polish citizens holding valid diplomatic or service passports issued by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period of up to 30 (thirty) days from the date of entry, subject to Article 2.

Article 2
VISAS FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

The provision of Article 1 shall not apply to citizens of either Contracting Party holding valid diplomatic or service passports seconded to work in a diplomatic mission or consular post in the territory of the other Contracting Party or to their family members forming part of a household with them. Before entering the territory of the other Contracting Party, such persons are required to obtain the relevant entry visa in the diplomatic mission of the other Contracting Party.

Article 3
DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of passport validity of nationals of either Contracting Party shall be at least 6 (six) months when entering the territory of the other Contracting Party.

Article 4
THE RIGHTS OF AUTHORITIES

1. The citizens of one Contracting Party who hold valid diplomatic or service passports shall be obligated to respect the laws applicable in the territory of the other Contracting Party while crossing the border and throughout their stay in the territory of the other Contracting Party.

2. Each Contracting Party reserves the right to refuse entry or shorten the stay of persons considered undesirable or likely to endanger the public peace, public order, public health or national security.

Article 5
SAMPLE AND ISSUANCE OF PASSPORT OR TRAVEL DOCUMENT

1. The Contracting Parties shall exchange specimens of their valid diplomatic and service passports, through diplomatic channels, within 30 (thirty) days after the signing of this Agreement.

www.bphn.go.id

2. In case of the introduction of new diplomatic and service passports, as well as modifications of existing ones, the Contracting Parties shall inform each other in writing, through diplomatic channels, of any changes no later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.

3. In case nationals of either Contracting Party lose or damage their diplomatic or service passports in the territory of the other Contracting Party, they shall immediately inform competent authorities in the receiving country through the diplomatic mission or consular post representing the country of origin. The diplomatic mission or consular post concerned shall, in compliance with the legislation of its country, issue to such persons a document to return to the country of origin.

Article 6
SUSPENSION

1. Either Contracting Party shall have the right to temporarily suspend the implementation of this Agreement in whole or in part for reasons of national security, public security, public order or public health.

2. The suspension, as well as revocation of the suspension referred to in paragraph 1 of this Article shall be immediately notified to the other Contracting Party through diplomatic channels.

Article 7
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any differences or disputes arising out of the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Contracting Parties.

Article 8
AMENDMENTS

This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual consent, in writing, by the Contracting Parties. Such amendments or revisions may in particular include an extension of the periods referred to in Article 1. The amendments or revisions shall enter into force on such date as may be determined by the Contracting Parties.

www.bphn.go.id

Article 9
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days after the date of receiving, through diplomatic channels, the later notification in which the Contracting Parties shall notify each other of the completion of all internal legal procedures required for the entry into force of this Agreement.

2. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. Each Contracting Party may terminate this Agreement by notification through diplomatic channels. In such event, the Agreement will expire after 90 (ninety) days from the date of receiving the notification of termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have entered into this Agreement.

Done at Warsaw on this 4th day of September in the year 2013, in two originals, each in the Indonesian, Polish, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any discrepancies in their interpretation, the English version shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
	
DIAN TRIANSYAH DJANI Director General for America and Europe Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia	**BOGUSŁAW WINID** Undersecretary of State in the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

www.bphn.go.id